



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 27
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 23 September 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Penyesuaian RKA K/L Kementerian Agama RI sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran 2. Isu – Isu Aktual
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPT.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 30 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Wakil Menteri Agama RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama RI membahas: “**Penyesuaian RKA-K/L Kementerian Agama RI Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan Isu-isu Aktual**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2021 hasil penyesuaian Badan Anggaran DPR RI sebesar **Rp66.961.386.828.000,-** (*enam puluh enam triliun sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) yang dialokasikan untuk program pada Unit Eselon I sebagai berikut:

NO	UNIT ESELON I	PENYESUAIAN ANGGARAN 2021 (Rp000)
1	Sekretariat Jenderal	2.280.046.995
2	Inspektorat Jenderal	170.124.955
3	Ditjen Pendidikan Islam	52.523.995.372
4	Ditjen Bimas Islam	5.757.112.044
5	Ditjen Bimas Kristen	1.870.028.494
6	Ditjen Bimas Katolik	899.724.298
7	Ditjen Bimas Hindu	803.751.045
8	Ditjen Bimas Buddha	272.661.176
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.593.301.172
10	Badan Litbang dan Diklat	693.143.361
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	97.497.916
JUMLAH		66.961.386.828

2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran di masa pandemi Covid-19, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk melakukan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan anggaran masing-masing program di Unit Eselon I, yang hasilnya dilaporkan kepada Komisi VIII DPR RI untuk mendapat persetujuan.

3. Komisi VIII DPR RI mendukung rencana Kementerian Agama RI untuk memasukkan anggaran Bantuan Operasional Madrasah swasta, Pesantren, MDT, LPTQ/TPQ, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya pada Tahun Anggaran 2022.
4. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk mempercepat pelaksanaan pengembalian atas pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan penambahan anggaran untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada Tahun Anggaran 2020.
 - b. Meningkatkan realisasi Bantuan Operasional Pondok Pesantren, MDT, dan LPTQ/TPQ tahun 2020, yang sampai dengan 16 September 2020 baru terealisasi sebesar 37,14%.
 - c. Melakukan realokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021 sejak awal tahun dari anggaran non-operasional antara lain untuk Bantuan Operasional Pesantren, MDT, LPTQ/TPQ, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya serta bantuan untuk mahasiswa di luar negeri pada masa pandemi.
 - d. Mengupayakan anggaran peningkatan sarana-prasarana di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
 - e. Menyusun kebijakan untuk rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.01 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H. YANDRI SUSANTO, Spt.